

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

Transjakarta Tuntaskan Hambatan Dua Rute Baru

JAKARTA, KOMPAS — Transjakarta masih merampungkan hambatan operasionalisasi dua rute baru. Rute dari Pondok Cabe ke Lebak Bulus terkendala izin yang belum keluar dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), sedangkan rute Pulogadung ke Wali Kota Jakarta Utara via Tipar Cakung masih dalam proses mediasi karena protes dari sopir angkot.

Semula Transjakarta mengumumkan bakal membuka rute S41 Pondok Cabe ke Lebak Bulus, Senin (4/3/2024). Operasionalisasi menggunakan bus *low entry* atau pintu masuk rendah dan beroperasi setiap hari mulai pukul 05.00 sampai pukul 22.00.

Sayangnya, operasional bus batal karena trayek antarwilayah membutuhkan izin dari BPTJ. "Pondok Cabe ke Lebak Bulus saat ini masih dalam proses perizinan dari BPTJ karena melintasi batas kota," ujar Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Wibowo, Senin (4/3).

Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah survey lintasan bersama BPTJ. Kemudian menggelar rapat bersama pengelola Terminal Pondok Cabe dan operator eksisting.

Adapun rute IOM Pulogadung ke Wali Kota Jakarta Utara via Tipar Cakung yang beroperasi mulai Kamis (22/2) di protes sopir angkot. Mereka berunjuk rasa di Tipar Cakung, Jumat (23/2).

Peristiwa itu sama seperti protes sopir mikrolet di Tebet, Jakarta Selatan, pada Mei 2023. Saat itu, sopir khawatir penghasilan mereka terganggu. Se-

mentara Transjakarta melalui akun resminya telah mengumumkan sampai saat ini masih dalam proses mediasi sehingga rute tersebut belum dapat melayani pelanggan.

"Untuk Pulogadung ke Kantor Wali Kota Jakarta Utara via Tipar Cakung, kami masih berkoordinasi," kata Wibowo.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Transjakarta, dan polisi masih berdiskusi dengan sopir angkot. Rute ini dibuka karena dibutuhkan oleh warga.

Layanan Transjakarta yang pertama kali diluncurkan pada 15 Januari 2004 telah menapaki perjalanan selama dua dekade pada Senin (15/1). Di usia yang baru, sejumlah masyarakat masih mendapati beberapa catatan yang harus segera diselesaikan, seperti tepat waktu dan perbaikan layanan penunjang.

Saat ini, panjang total sistem bus rapid transit (BRT) di Jakarta itu menjadi 244 kilometer. Transjakarta telah melayani 244 rute dengan 14 koridor dan 8 tipe layanan, yaitu 51 rute BRT, 61 rute angkutan umum integrasi, 94 rute Mikrotrans, 5 rute bus wisata, 1 layanan Transjakarta Cares, 13 rute Royaltrans, 10 rute Jabodetabek, dan 19 rute ke kawasan rumah susun.

Rute baru

Sementara itu, untuk menambah layanan transportasi, Jabodetabek Residence Connexion menambah rute baru. JR Connexion meluaskan layanan sampai ke kawasan pulau reklamasi. Rute baru ini menghubungkan PIK 2 dan Sedayu City Kelapa Gading sehingga

menambah pilihan moda selain Transjakarta dari Balai Kota ke Pantai Maju dan dua rute Damri di kawasan PIK.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) meresmikan operasional lima bus Jabodetabek Residence Connexion (JR Connexion) di Pantai Maju, PIK 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (4/3). Tiga bus diesel dan dua bus listrik itu beroperasi dari PIK 2 mulai pukul 06.30 sampai pukul 21.30 dengan waktu tunggu 30 menit, sedangkan dari Sedayu City Kelapa Gading, Jakarta Timur, mulai pukul 07.00 sampai pukul 22.00 dengan waktu tunggu 60 menit.

Bus antara lain melintasi halte/perhentian bus Tokyo Riverside, BUMN, dan ITC Cempaka Putih, serta Sedayu City, RSPAD, dan Balai Kota. Untuk tarifnya sebesar Rp 25.000.

Sekretaris BPTJ Marta Hardisawono mengatakan, JR Connexion menasar kelas menengah ke atas dengan tawaran kenyamanan, seperti tersedia akses Wi-Fi, berpendingin ruangan/AC, jumlah kursi per kolom dua unit, sabuk pengaman di tiap kursi, dan ada pengisi daya baterai gawai. Bus diisi penumpang sesuai jumlah tempat duduk sehingga tak ada penumpang berdiri.

"Khusus PIK ke Sedayu City ada bus listrik. Jual kenyamanan dan teknologi agar kelas menengah ke atas naik bus umum serasa mobil pribadi," ucap Marta.

Dalam kurun beberapa bulan ke depan akan ada sosialisasi dan promosi untuk menarik minat warga PIK dan Sedayu

City ataupun warga lainnya. Bentuknya mulai dari tarif dengan Rp 25.000, tidak perlu memikirkan parkir, BBM, dan biaya tol, serta bagi-bagi kopi gratis hingga peluang adanya pramugari dalam bus.

Sejak bergulir tahun 2017 hingga sekarang ini, JR Connexion sudah melayani 23 dari rencana 117 perumahan di Jabodetabek. Untuk tahun 2024, targetnya menjangkau 40 perumahan, antara lain Morizen, Discovery Bintaro Jaya, dan Alam Sutera.

Setahun kemudian atau tahun 2025 ditargetkan melayani 40 perumahan, seperti Suvarna Sutera, Springville Residence, dan The Orchid Mansion. Kemudian menjangkau 37 perumahan pada tahun 2026, yakni El Premio, Raffles Hills dan Grand Trevisa.

Selain itu, BPTJ akan menambah bus, meningkatkan integrasi dengan layanan angkutan umum lain, dan pemberian subsidi atau intervensi dari pemerintah melalui *account based ticketing* (ABT).

Transformasi layanan

Dalam peresmian JR Connexion itu, pengamat perkotaan Yayat Supriyatna menekankan transformasi layanan angkutan umum perkotaan yang tak asal-asalan. Apalagi, sarannya kelas menengah ke atas dari dua kawasan elite yang sering naik kendaraan pribadi daripada bus. "Mereka ingin naik bus tetapi nyaman kendaraan pribadi. Bisa tidur dengan nyaman ketika bus membelah kemacetan atau bekerja di dalam bus," kata Yayat.

Karena itu, sangat penting sosialisasi dan promosi yang menarik. Misalnya, cukup Rp 25.000 sudah bisa menikmati PIK atau Sedayu City tanpa bayar parkir, BBM, dan jalan tol.

Analisis transportasi jalan dari Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), AM Fikri juga mengapresiasi upaya perumahan terkoneksi dengan angkutan umum sehingga memudahkan mobilitas warga tanpa kendaraan pribadi. Upaya itu perlu terus didorong atau dikembangkan sembari dievaluasi agar berlanjut atau diimprovisasi.

Menurut Fikri, penyedia layanan angkutan umum membuat keputusan berbasis kajian dalam setiap kebijakan. Dengan demikian, setiap kebijakan angkutan umum bisa tepat sasaran, bermanfaat, dan efisien.

"Penentuan rute, koridor harus ada kajian. Bukan sekadar target, permintaan, atau titipan. Harus ada survei. Artinya, bukan asal buka," ujar Fikri.

Dalam kajian ada perencanaan, survei, untuk mengetahui kebutuhan warga, koreksi atau perbaikan, implementasi, dan evaluasi berkala. Semuanya butuh waktu atau tak bisa instan.

Menurut Fikri, hal itu patut ditanyakan kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Transjakarta. Hasil kajian atau data harus ditunjukkan hasilnya agar terlihat efektif atau tidak.

"Kematangan perencanaan penting dan dengar keinginan warga agar pindah ke angkutan umum," kata Fikri. (DAN)